



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 Agustus 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan. . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

23. Peraturan. . .

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan. . .

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1. . .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.298.348.071.263,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp13.811.000.220,00 (tiga belas milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.312.159.071.483,00 (tiga triliun tiga ratus dua belas milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp3.215.728.071.263,00
b. Bertambah	<u>Rp 41.518.512.469,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp3.257.246.583.732,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp3.298.348.071.263,00
b. Bertambah	<u>Rp 13.811.000.220,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp3.312.159.071.483,00

Surplus / (Defisit) Rp (54.912.487.751,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp82.620.000.000,00
2) (Berkurang)	<u>Rp(27.707.512.249,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp54.912.487.751,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp54.912.487.751,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2. . .

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp1.658.011.102.958,00	
2) Bertambah	<u>Rp 58.734.860.213,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.716.745.963.171,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp1.550.212.052.791,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (19.104.221.919,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.531.107.830.872,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp7.504.915.514,00	
2) Bertambah	<u>Rp1.887.874.175,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp9.392.789.689,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp1.343.532.878.052,00	
2) Bertambah	<u>Rp 25.085.615.444,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp1.368.618.493.496,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp177.429.998.460,00	
2) Bertambah	<u>Rp 19.254.075.021,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp196.684.073.481,00

c. Hasil . . .

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp13.000.000.000,00          |                     |
| 2) (Berkurang)   | <u>Rp (2.794.527.167,00)</u> |                     |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan |                              | Rp10.205.472.833,00 |
- d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp124.048.226.446,00       |                      |
| 2) Bertambah   | <u>Rp17.187.696.915,00</u> |                      |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan |                            | Rp141.237.923.361,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat
- |  |                             |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula  | Rp1.273.332.555.000,00      |                        |
| 2) Bertambah                                       | <u>Rp 20.848.567.277,00</u> |                        |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan |                             | Rp1.294.181.122.277,00 |
- b. Transfer antar daerah
- |  |                              |                      |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp276.879.497.791,00         |                      |
| 2) (Bekurang)                                  | <u>Rp(39.952.789.196,00)</u> |                      |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan |                              | Rp236.926.708.595,00 |

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp7.504.915.514,00        |                    |
| 2) Bertambah   | <u>Rp1.887.874.175,00</u> |                    |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan |                           | Rp9.392.789.568,00 |

Pasal 4. . .

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - 1) Semula Rp2.563.363.322.298,00
  - 2) Bertambah Rp 99.998.491.920,00
  - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp2.663.361.814.218,00
  
- b. Belanja modal
  - 1) Semula Rp679.752.630.682,00
  - 2) (Bekurang) Rp (37.464.057.446,00)
  - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp642.288.573.236,00
  
- c. Belanja tidak terduga
  - 1) Semula Rp55.232.118.283,00
  - 2) (Bekurang) Rp(48.723.434.254,00)
  - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp6.508.684.029,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
  - 1) Semula Rp1.232.867.523.492,00
  - 2) Bertambah Rp 8.698.109.125,00
  - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.241.565.632.617,00
  
- b. Belanja barang dan jasa
  - 1) Semula Rp1.173.195.984.122,00
  - 2) Bertambah Rp 70.708.544.564,00
  - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.243.904.528.686,00
  
- c. Belanja hibah
  - 1) Semula Rp157.230.449.637,00
  - 2) Bertambah Rp 20.466.781.233,00
  - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp177.697.230.870,00

d. Belanja. . .

- d. Belanja bantuan sosial
- |  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 1) Semula                              | Rp 69.365.047,00        |                  |
| 2) Bertambah                           | <u>Rp125.056.998,00</u> |                  |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan |                         | Rp194.422.045,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |                            |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp72.515.909.467,00        |                     |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 3.423.189.012,00</u> |                     |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan |                            | Rp75.939.098.479,00 |
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
- |  |                               |                      |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp200.881.600.150,00          |                      |
| 2) (Berkurang)   | <u>Rp (18.182.695.427,00)</u> |                      |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan Setelah perubahan |                               | Rp182.698.904.723,00 |
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |  |                               |                      |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp388.440.971.457,00          |                      |
| 2) (Berkurang)   | <u>Rp (24.830.012.195,00)</u> |                      |
| Jumlah belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi Setelah perubahan |                               | Rp363.610.959.262,00 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula   | Rp17.914.149.608,00        |                     |
| 2) Bertambah  | <u>Rp 2.125.461.164,00</u> |                     |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan |                            | Rp20.039.610.772,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
- |  |                              |                    |
|--|------------------------------|--------------------|
| a. Semula                                      | Rp55.232.118.283,00          |                    |
| b. (Berkurang)                                 | <u>Rp(48.723.434.254,00)</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                              | Rp6.508.684.029,00 |

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula			Rp82.620.000.000,00
2) (Berkurang)			<u>Rp(27.707.512.249,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan perubahan		setelah perubahan	Rp54.912.487.751,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp		0,00
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan perubahan		setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula			Rp82.620.000.000,00
2) (Berkurang)			<u>Rp(27.707.512.249,00)</u>
Jumlah sisa perhitungan tahun sebelumnya perubahan		lebih anggaran setelah perubahan	Rp54.912.487.751,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan. . .

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM

7. Lampiran

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
8. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
9. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
11. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
12. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain
13. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*)
14. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah
17. Lampiran XVII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU : (4,32/2023)

**KOTA BATAM**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.658.011.102.958</b>	<b>1.716.745.963.171</b>	<b>58.734.860.213</b>	<b>4 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.343.532.878.052	1.368.618.493.496	25.085.615.444	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	177.429.998.460	196.684.073.481	19.254.075.021	11 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000	10.205.472.833	(2.794.527.167)	21 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.048.226.446	141.237.923.361	17.189.696.915	14 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.550.212.052.791</b>	<b>1.531.107.830.872</b>	<b>(19.104.221.919)</b>	<b>1 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.273.332.555.000	1.294.181.122.277	20.848.567.277	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.879.497.791	236.926.708.595	(39.952.789.196)	14 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.504.915.514</b>	<b>9.392.789.689</b>	<b>1.887.874.175</b>	<b>25 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.504.915.514	9.392.789.689	1.887.874.175	25 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.215.728.071.263</b>	<b>3.257.246.583.732</b>	<b>41.518.512.469</b>	<b>1 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.563.363.322.298</b>	<b>2.663.361.814.218</b>	<b>99.998.491.920</b>	<b>4 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.232.867.523.492	1.241.565.632.617	8.698.109.125	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.195.984.122	1.243.904.528.686	70.708.544.564	6 %
5.1.05	Belanja Hibah	157.230.449.637	177.697.230.870	20.466.781.233	13 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	69.365.047	194.422.045	125.056.998	180 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>679.752.630.682</b>	<b>642.288.573.236</b>	<b>(37.464.057.446)</b>	<b>6 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.515.909.467	75.939.098.479	3.423.189.012	5 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.881.600.150	182.698.904.723	(18.182.695.427)	9 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	388.440.971.457	363.610.959.262	(24.830.012.195)	6 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.914.149.608	20.039.610.772	2.125.461.164	12 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>55.232.118.283</b>	<b>6.508.684.029</b>	<b>(48.723.434.254)</b>	<b>88 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	55.232.118.283	6.508.684.029	(48.723.434.254)	88 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.298.348.071.263</b>	<b>3.312.159.071.483</b>	<b>13.811.000.220</b>	<b>0 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(82.620.000.000)</b>	<b>(54.912.487.751)</b>	<b>27.707.512.249</b>	<b>-34 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>82.620.000.000</b>	<b>54.912.487.751</b>	<b>(27.707.512.249)</b>	<b>34 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.620.000.000	54.912.487.751	(27.707.512.249)	34 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>82.620.000.000</b>	<b>54.912.487.751</b>	<b>(27.707.512.249)</b>	<b>34 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>82.620.000.000</b>	<b>54.912.487.751</b>	<b>(27.707.512.249)</b>	<b>34 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**KOTA BATAM**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.890.638.065	1.360.514.804.868	443.916.538.858	0	0	1.804.431.343.726	181.912.733.465	1.443.103.593.437	414.580.990.972	0	0	1.857.684.584.409
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	797.529.253.541	94.969.033.463	0	0	892.498.287.004	0	837.090.619.402	94.938.483.898	0	0	932.029.103.300
1 01	DINAS PENDIDIKAN	0	797.529.253.541	94.969.033.463	0	0	892.498.287.004	0	837.090.619.402	94.938.483.898	0	0	932.029.103.300
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	84.125.108.065	363.917.734.257	17.060.874.800	0	0	380.978.609.057	101.951.542.532	418.526.619.039	17.310.651.093	0	0	435.837.270.132
1 02	DINAS KESEHATAN	14.345.831.730	189.884.774.993	9.519.095.779	0	0	199.403.870.772	17.951.542.532	199.036.829.150	9.181.731.779	0	0	208.218.560.929
1 02	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	69.779.276.335	128.869.200.741	4.498.980.000	0	0	133.368.180.741	84.000.000.000	171.660.883.090	3.019.210.000	0	0	174.680.093.090
1 02	UPTD PUSKESMAS BATU AJI	0	1.724.247.661	154.536.000	0	0	1.878.783.661	0	2.015.504.371	216.228.600	0	0	2.231.732.971
1 02	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	0	1.036.361.519	64.434.274	0	0	1.100.795.793	0	1.145.989.498	122.854.709	0	0	1.268.844.207
1 02	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG	0	1.915.255.826	50.000.000	0	0	1.965.255.826	0	2.225.143.076	146.580.000	0	0	2.371.723.076
1 02	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG	0	2.030.257.058	65.493.996	0	0	2.095.751.054	0	2.106.636.874	154.883.850	0	0	2.261.520.724
1 02	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU	0	1.317.115.546	197.479.700	0	0	1.514.595.246	0	1.489.196.169	252.174.600	0	0	1.741.370.769
1 02	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP	0	1.833.377.492	154.386.463	0	0	1.987.763.955	0	2.015.899.245	275.497.200	0	0	2.291.396.445
1 02	UPTD PUSKESMAS	0	1.404.159.054	34.100.000	0	0	1.438.259.054	0	1.357.042.205	34.100.000	0	0	1.391.142.205

**KOTA BATAM**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7 01.1.03.2.11.12.0005	KELURAHAN BATU SELICIN	0	216.007.680	2.697.399.200	0	0	2.913.406.880	0	215.035.560	2.289.562.800	0	0	2.504.598.360
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	30.692.590.057	273.497.700	0	0	30.966.087.757	0	50.278.046.204	288.780.500	0	0	50.566.826.704
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	30.692.590.057	273.497.700	0	0	30.966.087.757	0	50.278.046.204	288.780.500	0	0	50.566.826.704
8 01 8 01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	30.692.590.057	273.497.700	0	0	30.966.087.757	0	50.278.046.204	288.780.500	0	0	50.566.826.704
	<b>TOTAL</b>	<b>3.215.728.071.263</b>	<b>2.563.363.322.298</b>	<b>679.752.630.682</b>	<b>55.232.118.283</b>	<b>0</b>	<b>3.298.348.071.263</b>	<b>3.257.246.583.732</b>	<b>2.663.361.814.218</b>	<b>642.288.573.236</b>	<b>6.508.684.029</b>	<b>0</b>	<b>3.312.159.071.483</b>

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUJDI



**KOTA BATAM**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening			Uraian			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 01 5 1			BELANJA OPERASI	39.780.000	39.780.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 01 5 1 02			Belanja Barang dan Jasa	39.780.000	39.780.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.910.000	80.910.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 02 5 1			BELANJA OPERASI	80.910.000	80.910.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 02 5 1 02			Belanja Barang dan Jasa	80.910.000	80.910.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.030.000	38.030.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 06 5 1			BELANJA OPERASI	38.030.000	38.030.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 06 5 1 02			Belanja Barang dan Jasa	38.030.000	38.030.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>						<b>30.966.087.757</b>	<b>50.566.826.704</b>	<b>19.600.738.947</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>						<b>(30.966.087.757)</b>	<b>(50.566.826.704)</b>	<b>(19.600.738.947)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>									
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**KOTA BATAM**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja				Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.360.514.804.868	443.916.538.858	0	0	1.804.431.343.726	1.443.103.593.437	414.580.990.912	0	1.857.684.584.409	53.253.240.683
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	797.529.253.541	94.969.033.463	0	0	892.498.287.004	837.090.619.402	94.938.483.898	0	932.029.103.300	39.530.816.296
1 01	DINAS PENDIDIKAN	797.529.253.541	94.969.033.463	0	0	892.498.287.004	837.090.619.402	94.938.483.898	0	932.029.103.300	39.530.816.296
1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	476.642.039.014	350.041.600	0	0	476.992.080.614	509.747.017.248	293.793.600	0	510.040.810.848	33.048.730.234
1 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	471.268.723.424	0	0	0	471.268.723.424	505.122.446.358	0	0	505.122.446.358	33.853.722.934
1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	468.955.503.424	0	0	0	468.955.503.424	502.809.226.358	0	0	502.809.226.358	33.853.722.934
1 01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.313.220.000	0	0	0	2.313.220.000	2.313.220.000	0	0	2.313.220.000	0
1 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.115.286.750	350.041.600	0	0	1.465.328.350	836.043.250	293.793.600	0	1.129.836.850	(335.491.500)
1 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576.931.250	350.041.600	0	0	926.972.850	641.931.250	293.793.600	0	935.724.850	8.752.000
1 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.860.000	0	0	0	47.860.000	28.060.000	0	0	28.060.000	(19.800.000)
1 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0
1 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.495.500	0	0	0	475.495.500	151.052.000	0	0	151.052.000	(324.443.500)
1 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.766.961.840	0	0	0	3.766.961.840	3.251.160.640	0	0	3.251.160.640	(515.801.200)
1 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.128.434.400	0	0	0	1.128.434.400	987.900.000	0	0	987.900.000	(140.534.400)
1 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.638.527.440	0	0	0	2.638.527.440	2.263.260.640	0	0	2.263.260.640	(375.266.800)
1 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.067.000	0	0	0	491.067.000	537.367.000	0	0	537.367.000	46.300.000
1 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	221.800.000	0	0	0	221.800.000	301.520.000	0	0	301.520.000	79.720.000

**KOTA BATAM**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Belanja				Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			
	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 8.01.0.00.0.01.0000 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.926.926.474	0	0	0	6.184.163.707	0	0	0	6.184.163.707		(1.742.762.767)
8 01 8.01.0.00.0.01.0000 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.297.897.474	0	0	0	5.634.788.707	0	0	0	5.634.788.707		(1.663.108.767)
8 01 8.01.0.00.0.01.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	629.029.000	0	0	0	549.375.000	0	0	0	549.375.000		(79.654.000)
	<b>TOTAL</b>	<b>2.563.363.322.298</b>	<b>679.752.630.682</b>	<b>55.232.118.283</b>	<b>0</b>	<b>2.663.361.814.218</b>	<b>642.288.573.236</b>	<b>6.508.684.029</b>	<b>0</b>	<b>3.312.159.071.483</b>	<b>0</b>	<b>13.811.000.220</b>

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**KOTA BATAM**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)					
		Kelompok Belanja				Kelompok Belanja									
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer						
01	<b>PELAYANAN UMUM</b>														
01 01 1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	476.642.039.014	350.041.600	0	0	476.992.080.614	293.793.600	0	0	509.747.017.248	293.793.600	0	0	510.040.810.848	33.048.730.234
01 02 1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	293.248.620.858	8.262.004.921	0	0	301.510.625.779	7.231.905.925	0	0	334.662.544.195	7.231.905.925	0	0	341.894.450.120	40.383.824.341
01 03 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.170.842.749	4.152.416.890	0	0	42.323.259.639	2.028.758.720	0	0	33.993.416.090	2.028.758.720	0	0	36.022.174.810	(6.301.084.829)
01 04 1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.852.879.445	819.112.500	0	0	12.671.991.945	997.865.572	0	0	11.302.947.953	997.865.572	0	0	12.300.813.525	(371.178.420)
01 05 1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	57.799.553.944	89.752.000	0	0	57.889.305.944	78.222.000	0	0	56.505.610.293	78.222.000	0	0	56.583.832.293	(1.305.473.651)
01 06 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.694.402.427	483.597.860	0	0	11.178.000.287	761.335.760	0	0	9.569.378.097	761.335.760	0	0	10.330.713.857	(847.286.430)

10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.020.772.296	3.780.000	0	0	0	6.024.552.296	10.149.311.361	3.780.000	0	0	10.153.091.361	4.128.539.065
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	257.422.000	241.198.800	0	0	0	498.620.800	284.152.250	253.080.800	0	0	537.233.050	38.612.250
11				<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>												
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.480.076.047	140.036.000	0	0	0	5.620.112.047	6.562.178.045	205.924.800	0	0	6.768.102.845	1.147.990.798
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.192.919.300	0	0	0	0	5.192.919.300	9.670.929.440	0	0	0	9.670.929.440	4.478.010.140
<b>TOTAL</b>					<b>2.563.363.322.298</b>	<b>679.752.630.682</b>	<b>55.232.118.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.298.348.071.263</b>	<b>2.663.361.814.218</b>	<b>642.288.573.236</b>	<b>6.508.684.029</b>	<b>0</b>	<b>3.312.159.071.483</b>	<b>13.811.000.220</b>

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**KOTA BATAM**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ Berkurang
<b>A SPM Bidang Pendidikan</b>						
<b>Pendidikan Dasar</b>						
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	99.774.000	99.774.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru	4.233.998.200	3.392.128.800	(841.869.400)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.805.763.925	7.728.318.925	922.555.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	362.315.666	362.315.666	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	676.122.000	159.839.000	(516.283.000)
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.300.100.000	2.315.100.000	15.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.800.604.000	4.046.404.000	245.800.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	47.936.490.080	50.252.383.480	2.315.893.400
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.173.776.650	3.173.776.650	0
<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				<b>69.289.170.521</b>	<b>71.530.040.521</b>	<b>2.240.870.000</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>						
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5.231.120.400	606.008.000	(4.625.112.400)
			Penambahan Ruang Kelas Baru	6.840.602.800	6.387.200.800	(453.402.000)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.529.707.400	2.095.531.400	565.824.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	121.304.458	121.304.458	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.576.300.000	1.616.300.000	40.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.543.939.000	2.018.295.000	474.356.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.263.669.000	1.476.405.000	212.736.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.261.742.400	22.156.023.400	3.894.281.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.574.101.550	2.827.290.150	253.188.600
<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				<b>38.942.487.008</b>	<b>39.304.358.208</b>	<b>361.871.200</b>
<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>				<b>108.231.657.529</b>	<b>110.834.398.729</b>	<b>2.602.741.200</b>
<b>Pendidikan Kesetaraan</b>						
<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>						

**KOTA BATAM**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		467.519.200	883.141.200	415.622.000
		Penyediaan Makanan		467.519.200	883.141.200	415.622.000
		<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		467.519.200	883.141.200	415.622.000
		<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>		467.519.200	883.141.200	415.622.000
		<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>		2.376.864.200	3.545.451.200	1.168.587.000

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**KOTA BATAM**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.803.746.143.499	1.804.431.343.726	1.857.684.584.409	53.253.240.683	3 %	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.350.928.893.304	892.498.287.004	932.029.103.300	39.530.816.296	4 %	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	977.291.987.146	476.992.080.614	510.040.810.848	33.048.730.234	7 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	368.530.906.158	415.506.206.390	421.899.909.452	6.393.703.062	2 %	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.380.000.000	0	58.508.000	58.508.000	100 %	
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.100.000.000	0	10.012.500	10.012.500	100 %	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	626.000.000	0	19.862.500	19.862.500	100 %	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	822.518.863.991	380.978.609.057	435.837.270.132	54.858.661.075	14 %	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.433.775.290.608	301.510.625.779	341.894.450.120	40.383.824.341	13 %	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.030.283.562.898	76.512.393.998	90.287.438.112	13.775.044.114	18 %	
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.469.571.254	459.690.500	1.172.322.750	712.632.250	155 %	
1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	321.504.967	885.542.000	576.600.000	(308.942.000)	35 %	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.057.846.838	1.609.806.780	1.906.459.150	296.652.370	18 %	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	830.889.827.234	348.795.000.531	307.325.205.777	(41.469.794.754)	12 %	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.753.118.756	42.323.259.639	36.022.174.810	(6.301.084.829)	15 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.262.916.899	15.788.667.960	12.960.326.960	(2.828.341.000)	18 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	173.100.033.920	44.811.751.830	34.791.947.430	(10.019.804.400)	22 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.331.999.344	2.131.200.000	2.131.200.000	0	0 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	82.500.000.000	22.602.390.051	19.302.951.008	(3.299.439.043)	15 %	
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	165.029.366.154	106.451.033.820	92.563.643.674	(13.887.390.146)	13 %	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	272.743.980.126	107.173.289.581	106.058.815.925	(1.114.473.656)	1 %	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.541.239.218	1.134.932.990	720.738.590	(414.194.400)	36 %	

**KOTA BATAM**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

	Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
8	01	02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.435.520.550	3.411.690.300	4.281.647.800	869.957.500	25 %
8	01	03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	40.759.132.314	5.140.122.627	26.903.093.627	21.762.971.000	423 %
8	01	04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6.620.049.314	3.224.120.000	1.999.120.000	(1.225.000.000)	38 %
8	01	05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	4.532.807.722	3.176.912.000	3.768.188.000	591.276.000	19 %
8	01	06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	4.194.546.974	7.926.926.474	6.184.163.707	(1.742.762.767)	22 %

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**KOTA BATAM**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)		Perubahan PPAS (Rp)		Perubahan APBD (Rp)	
1.01.000.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN		926.437.944.639	931.637.537.700	932.029.103.300		
1.01.000.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	926.437.944.639	931.637.537.700	932.029.103.300		
1.01.000.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1	926.437.944.639	931.637.537.700	932.029.103.300		
1.01.000.0.00.01.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	497.115.913.187	509.687.810.848	510.040.810.848		
1.01.000.0.00.01.0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	492.001.929.897	504.777.446.358	505.122.446.358		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	489.688.709.897	502.464.226.358	502.809.226.358		
1.01.000.0.00.01.0000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	2.313.220.000	2.313.220.000	2.313.220.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1.203.921.250	1.129.836.850	1.129.836.850		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	896.375.250	935.724.850	935.724.850		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	28.060.000	28.060.000	28.060.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	264.486.000	151.052.000	151.052.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.391.695.040	3.251.160.640	3.251.160.640		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1.128.434.400	987.900.000	987.900.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	2.263.260.640	2.263.260.640	2.263.260.640		
1.01.000.0.00.01.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	518.367.000	529.367.000	537.367.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	221.800.000	232.800.000	301.520.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	275.440.000	275.440.000	214.720.000		
1.01.000.0.00.01.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	21.127.000	21.127.000	21.127.000		
1.01.000.0.00.01.0000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	429.233.648.452	421.861.343.852	421.899.909.452		
1.01.000.0.00.01.0000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	242.508.450.080	237.356.269.880	238.006.269.880		
1.01.000.0.00.01.0000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	99.774.000	99.774.000	99.774.000		

**KOTA BATAM**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
	SOSIAL, DAN BUDAYA			
8.01.000.0.00.01.0000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.084.312.000	3.684.312.000	3.768.188.000
8.01.000.0.00.01.0000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.084.312.000	3.684.312.000	3.768.188.000
8.01.000.0.00.01.0000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.551.894.574	6.184.163.707	6.184.163.707
8.01.000.0.00.01.0000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.551.894.574	6.184.163.707	6.184.163.707
8.01.000.0.00.01.0000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.002.519.574	5.634.788.707	5.634.788.707
8.01.000.0.00.01.0000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	549.375.000	549.375.000	549.375.000

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**KOTA BATAM**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	Rp	%		
<b>1</b>	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>															
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	72.375.000	0	0	0	48.250.000	0	0	0	0	0	0	48.250.000	100
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	694.540.000	0	0	0	890.290.000	0	0	0	0	0	0	890.290.000	100
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	467.519.200	0	0	0	883.141.200	0	0	0	0	0	0	883.141.200	100
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
			DINAS TENAGA KERJA	7.388.647.680	0	0	0	7.524.842.680	0	0	0	0	0	0	7.524.842.680	100
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
			DINAS TENAGA KERJA	86.572.000	0	0	0	86.572.000	0	0	0	0	0	0	86.572.000	100
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	361.200.000	0	0	0	141.400.000	0	0	0	0	0	0	141.400.000	100
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
 NOMOR : 4 Tahun 2023  
 TANGGAL : 06 Oktober 2023

PEMERINTAH KOTA BATAM  
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
IV/e	0	0	0	0	0	3	0	3
IV/d	0	1	0	0	0	4	0	5
IV/c	0	24	0	0	0	14	0	38
IV/b	0	11	40	4	0	119	7	181
IV/a	0	1	81	26	0	457	14	579
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>121</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>21</b>	<b>806</b>
III/d	0	0	53	240	0	690	150	1133
III/c	0	0	9	181	0	770	249	1209
III/b	0	0	0	109	0	581	293	983
III/a	0	0	0	9	0	508	230	747
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>2549</b>	<b>922</b>	<b>4072</b>
II/d	0	0	0	0	0	127	245	372
II/c	0	0	0	0	0	147	155	302
II/b	0	0	0	0	0	12	58	70
II/a	0	0	0	0	0	11	19	30
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>477</b>	<b>774</b>
I/d	0	0	0	0	0	0	15	15
I/c	0	0	0	0	0	0	5	5
I/b	0	0	0	0	0	0	3	3
I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>183</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>3443</b>	<b>1443</b>	<b>5675</b>

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 4 Tahun 2023  
 Tanggal : 06 Oktober 2023

**PEMERINTAH KOTA BATAM  
 DAFTAR PIUTANG DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1.	Piutang Pajak	2017	540.654.599.592,00	234.585.407.348,00	142.381.493.552,00	632.858.513.388,00
2	Piutang Retribusi	2016	6.682.522.421,44	37.577.935.288,00	37.702.325.818,90	6.558.131.890,54
3	Piutang Lainnya	2016	304.394.365.819,35	501.052.533.464,38	244.227.537.613,90	561.219.361.669,83
	<b>JUMLAH</b>		851.731.487.832,79	773.215.876.100,38	424.311.356.984,80	1.200.636.006.948,37

Wali Kota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 4 Tahun 2023  
 Tanggal : 06 Oktober 2023

**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHK KETICA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PEWYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13
1	2001	PT. BANK RIAU KEPRI		SAHAM		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00				
2	2004	PT.PEMBANGUNAN KOTA BATAM		SAHAM		12.483.488.458,18		12.483.488.458,18				
3	2005	PT.RIAU AIR LINES		SAHAM		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00				
4	2013	PT. PELABUHAN BATAMI INDONESIA		SAHAM		1.082.137.028,83		1.082.137.028,83				
<b>J U M L A H</b>						85.565.625.487,01		85.565.625.487,01				

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 4 Tahun 2023  
 Tanggal : 06 Oktober 2023

**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN T-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN T-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN T-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN T-1
	2	3	4	5	6
1	TANAH	2.124.499.077.288,13	1.800.731.463.310,18	467.254.762.762,17	3.457.975.777.836,14
2	PERALATAN DAN MESIN	776.307.247.622,74	101.239.388.091,82	14.760.944.861,31	862.785.690.853,25
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.657.570.435.505,40	267.097.590.780,61	68.985.403.796,31	2.855.682.622.489,70
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	2.598.943.162.823,72	399.441.954.098,15	-	2.998.385.116.921,86
5	ASET TETAP LAINNYA	330.034.403.108,73	76.609.960.299,13	11.196.127.358,36	395.448.236.049,51
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	54.633.841.385,50	4.268.100.060,00	8.704.617.335,00	50.197.324.110,50
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.015.289.210.222,12)	(433.440.593.501,79)	(64.305.020.926,95)	(3.384.424.782.796,94)
	<b>J U M L A H</b>	<b>5.526.698.957.512,10</b>	<b>2.215.947.863.138,10</b>	<b>514.226.991.511,02</b>	<b>7.236.049.985.463,98</b>

Wali Kota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 4 Tahun 2023  
 Tanggal : 06 Oktober 2023

PEMERINTAH KOTA BATAM  
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	LOKASI SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1		JUMLAH REALISASI S.D AKHIR TA T-1	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAKAN DALAM TAHUN INI (Rp)	
				APBD TA T-1	PERUBAHAN APBD TA T-1		APBD TA T	PERUBAHAN APBD TA T
1	2	3		4	5	6	7	8
1	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis daerah Kabupaten/kota	Batam	51.183.496.686,00	51.183.496.686	50.173.639.636	51.687.245.342,00	51.687.245.342
	<b>JUMLAH</b>			<b>51.183.496.686,00</b>	<b>51.183.496.686,00</b>	<b>50.173.639.636,00</b>	<b>51.687.245.342,00</b>	<b>51.687.245.342,00</b>

Wali Kota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Batam  
Nomor : 4 Tahun 2023  
Tanggal : 06 Oktober 2023

**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DAFTAR DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL ( Rp )	TRANSFER DARI KAS DAERAH ( Rp )	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	<b>JUMLAH</b>							

Wali Kota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 4 Tahun 2023

TANGGAL : 06 Oktober 2023

**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PRESENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN		
								POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
<b>JUMLAH</b>												

Wali Kota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI